Pembuatan Dan Penyebaran Video yang Bermuatan Asusila Secara Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Implementasinya Terhadap Kasus Penyebaran Video yang Bermuatan Asusila di Kota Banjarmasin

Wisda Yundiasari, Neni Ruhaeni

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

wisdayundias@gmail.com, nenihayat@gmail.com

Abstract— Immoral crimes, which involve issues of ethics, decency or actions that point to a person's honor. In an increasingly growing era, crime does not only occur in the real world such as direct crime, but crimes can occur in electronic media or cyberspace using technological methods without touching but pointing to crime indirectly. Crime in cyberspace or electronic media, namely cyber crime, is divided into several cyber crimes such as crimes in the distribution and production of immoral videos, namely pornography. Not only is the spread alone the perpetrator who deliberately keeps videos that are immoral can become perpetrators of immoral content. There is no intention to spread. Therefore, this researcher examines how to regulate the distribution of videos with immoral contents electronically based number 19 of 2016 concerning amendment to law number 11 of 2008 concerning electronic information and transaction and how to implement the distribution of immoral videos in the city of Banjarmasin. The research method used is juridical normative, which is carried out by examining library materials or secondary data as basic library materials. Descriptive analysis data analysis is used to analyze a quantitative approach. Data collection techniques are obtained from secondary data, namely library research. The results of this study concluded that law number 19 of 2016 concerning electronic information and transactions regulates immoral crimes electronically in the distribution of content, but this law does not specifically regulate the making of videos with immoral content as regulated in law number 44 of 2008 concerning pornography which specifically regulates. Law enforcement against immoral crime electronically in the city of Banjarmasin stipulates that only the perpetrators of the transmission are subject to sanctions, not ensnaring the maker as stipulated in law number 44 of 2008 concerning pornography. Thus in this case only provision based on law number 19 of 2016 concerning amendments to law number 11 of 2008 concerning electronic informations are enforced

Keywords— criminal acts, cyber crime, pornography, media

electronics

Abstrak— Tindak pidana asusila, dimana menyangkut masalah etika, kesopanan maupun perbuatan yang merujuk pada kehormatan seseorang. Jaman semakin berkembang kejahatan tidak saja terjadi pada dunia nyata seperti kejahatan langsung tetapi kejahatan bisa saja terjadi di dalam media elektronik atau dunia maya dengan menggunakan metode teknologi tanpa menyentuh tetapi berujung pada kejahatan secara tidak langsung. Kejahatan dalam dunia maya atau media elektronik yaitu cyber crime, terbagi beberapa cyber crime seperti kejahatan dalam penyebaran dan pembuatan video yang bermuatan asusila yakni pornografi. tidak hanya penyebaran saja yang menjadi pelaku yang membuat dengan sengaja menyimpan video yang bermuatan asusila bisa jadi menjadi pelaku meskipun pembuat tidak ada niatan untuk menyebarkan. Oleh karena itu peneliti ini mengkaji Bagaimana pengaturan penyebaran video yang bermuatan asusila secara elektronik berdasarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Bagaimana implementasinya terhadap penyebaran video yang bermuatan asusila di kota Banjarmasin. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data skunder sebagai bahan dasar keperustakaan. bersifat deskriptif analisis, analisis data yang digunakan untuk menganalisis secara pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari data sekunder yaitu penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, mengatur tentang tindak pidana asusila secara elektronik dalam penyebaran video yang bermuatan asusila, namun undang-undang ini tidak secara spesifik mengatur mengenai pembuatan video yang bermuatan asusila sebagaimana halnya diatur dalam undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yang secara khusus mengatur. penegakan hukum terhadap tindak pidana asusila

secara elektronik di kota Banjarmasin menetapkan bahwa hanya pelaku-pelaku penyebarannya saja yang dikenakan sanksi, tidak menjerat kepada pembuat sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Dengan demikian terhadap kasus ini hanya diberlakukan ketentuan - ketentuan berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

Kata Kunci— Tindak pidana asusila, cyber crime, pornografi, media elektronik

I. PENDAHULUAN

Perubahan zaman mengantarkan kehidupan masyarakat dalam aspek kehidupan yang lebih maju dalam berbagai bidang seperti bidang sosial, budaya, ekonomi maupun teknologi. Perkembangan teknologi merupakan salah satu bukti dari adanya modernisasi dalam masyarakat, antara lain teknologi informasi dan komunikasi.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena disatu sisi memberikan distribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun disisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum. Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan.

Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui system komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah cybercrime terlihat pula dari munculnya berbagai istilah seperti economic cyber crime, EFT (Elektronik Funds Transfer) Crime, Cybank, Crime, Internet Banking, Crime, On_Line Business Crime, Cyber Crime Electronic Money laundering, Hitech WWC (White Collar Crime), Internet Fraud (antara lain Bank Fraud), Credit Card Fraud, On_Line Fraud, Cyber Terrorism, Cyber Stalking, Cyber Sex, Cyber Pornography, Cyber Defamation, Cyber_Criminals, dsb. Salah satu masalah cyber crime yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian dari berbagai kalangan adalah masalah cybercrime di bidang kesusilaan. Jenis cybercrime dibidang kesusilaan yang sering diungkapkan adalah cyber pornography (khususnya child pornography) dan cybersex. Banyak orang dengan menyebarkan video serta gambar yang melanggar aspek pidana asusila untuk memperjual belikan serta dengan maksud untuk meracuni para pengguna di dalam dunia maya. Pengungkapan yang dilakukan melalui penyebaran konten-konten yang berpengaruh buruk bagi orang-orang yang menontonnya apabila tidak dipantau dan tidak diberikan sanksi atas perilaku penyimpangan tersebut, maka akan mengakibatkan dampak buruk terhadap psikologi. Salah satu tindak pidana asusila yang dilakukan secara elektronik adalah penyebaran video yang bermuatan pornografi.

Seperti kasus video yang bermuatan asusila yang terjadi di kota Banjarmasin yang mana video tersebut tersebar di

media elektronik didalam aplikasi WhatsApp sehingga pemeran pria dalam video yang bermuatan asusila tersebut melapor kepada polisi. Pemeran dalam video tersebut yaitu pemeran pria berinisial G dan pemeran wanita berinisial N. G melapor ke polisi, pada hari sabtu 31 agustus 2019, dia sebagai pemeran merasa sebagai korban karena video yang dibuat oleh dirinya telah tersebar luas. kasus beredarnya video mesum ini masih dalam tahap penyelidikan. kedua pemeran dalam video mesum di Banjarmasin ini tidak dapat dijerat secara hukum karena keduanya adalah sebagai korban. Kedua pemeran yang ada di dalam video yang bermuatan asusila atau video mesum itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Dan saat ini hannya menjerat pada pelaku penyebaran video yang bermuatan asusila tersebut. Penyidik juga sudah meminta keterangan terhadap pemeran pria dalam video tersebut. dapat dilihat dari kasus tersebut bahwa dalam pembuatan video yang bermuatan asusila sebagai korban sedangkan mereka membuat video yang bermuatan asusila itu secara sengaja dan di sadari. Unsur pidana yang harus dibuktikan seseorang menjadi tersangka pornografi yaitu membuktikan adanya niat untuk menyebarkan konten tersebut dan membuktikan pembuatan konten bukan untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian perlu melakukan penelitian terhadap sanksi untuk pelaku pembuat dan penyebar tindak pidana asusila dalam penyebaran video asusila dengan judul pembuatan dan penyebaran video yang bermuatan asusila secara elektronik berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik dan implementasi terhadap penyebaran video yang bermuatan asusila di kota Banjarmasin.

Selanjutnya, Tujuan dalam penelitian ini di uraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui pengaturan penyebaran dan pembuatan video yang bermuatan asusila secara elektronik berdasarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
2. Untuk mengetahui implementasinya terhadap penyebaran dan pembuatan video yang bermuatan asusila di kota Banjarmasin.

II. LANDASAN TEORI

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. tanggung jawab pidana setiap orang, yaitu seseorang baru dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana apabila ada bukti bahwa dia telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya oleh

undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya yang sudah berlaku, baik yang bersifat umum maupun khusus.

Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah kesusilaan etika). Pernyataan ini menunjukkan bahwa menentukan Batasan atau pengertian mengenai kesusilaan tidaklah sederhana. Batasan-batasan kesusilaan (etika) sangat bergantung dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kejahatan dalam tindak pidana asusila dalam media elektronik yakni cyber crime. Cyber crime atau bisa disebut dengan kejahatan dunia maya merupakan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sarana atau tempat terjadinya kejahatan. Cyber Crime yang menyerang individu : kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba atau mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi.

Menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang no 11 tahun 2008 tindak pidana asusila terhadap penyebaran diatur dalam pasal 27 ayat (1) jo pasal 44 ayat (1) yakni “ orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar asusilaan. Dalam peraturan perundang-undangan nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi pasal 1 ayat (1) bahwa Pornografi adalah gambar , sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar, bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh , atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan / atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .

A. *Penyebaran dan pembuatan asusila secara elektronik berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik*

Peraturan dalam penyebaran video yang bermuatan asusila diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik yakni pasal 27 ayat (1) “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan transaksi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” . Ancaman pidananya pasal 45 ayat (1) “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (sat

miliar rupiah). Penyebaran dalam media elektronik yang melanggar hukum yakni penyebaran tanpa izin, penyebaran tidak sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya, penyebaran yang tidak senonoh atau tidak pantas untuk diperlihatkan. Selain dari undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, Adapun peraturan mengenai larangan penyebaran video yang bermuatan asusila yakni undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, yakni pasal 4 ayat (1) “ setiap orang dilarang memproduksi , membuat , memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

1. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
2. Kekerasan seksual;
3. Mastrubasi atau onani;
4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. Alat kelamin; atau
6. Pornografi anak.

Dalam pasal tersebut sudah jelas dalam penyebaran yakni memperbanyak, menggandakan, menyebarkan.

Pembuatan yang berarti segala sesuatu yang dibentuk atau diciptakan oleh seseorang seperti didalam penjelasan pasal 4 ayat 1 disebutkan kata membuat. Dalam pembuatan dalam bentuk file, yakni video yang berkaitan dengan adanya tindakan asusila tentu arti pembuatan disini bersifat negatif yang berarti tindakan yang dilarang kemudian dilanggar menjadi perbuatan hukum tindak pidana. Dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik pasal 1 sub 2 menjelaskan bahwa elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer , jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Penyimpanan produk pornografi pasal 6 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi “setiap orang dilarang memperdagangkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan undang-undang” dalam arti larangan untuk tidak menyimpan produk pornografi , tetapi dalam peraturan informasi transaksi elektronik tidak diatur secara rinci mengenai penyimpanan produk pornografi, hal ini bisa saja terjerat hukum apabila dalam penyimpanan pornografi tanpa diketahui oleh salah satu pihak baik pihak pria maupun pihak wanita, penyimpanan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang membuat video yang bermuatan asusila tersebut. Jika dalam pembuatan video yang berarti secara otomatis tersimpan dengan sengaja, kemudian jika video yang telah dibuat dan disimpan didalam media elektronik tersebut tersebar baik melalui pihak yang bersangkutan maupun pihak lain dengan maksud untuk menyebarkan video yang bermuatan

asusila tersebut, maka keduanya dapat dijerat hukum karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum yakni penyimpanan produk pornografi dan membuat dengan sengaja artinya pelaku dikatakan melawan hukum. Secara garis besar dalam peraturan mengenai pembuatan dalam bentuk video yang bermuatan asusila dalam peraturan mengenai informasi transaksi elektronik tidak diatur hanya mengatur mengenai penyebaran baik gambar, video ataupun berbentuk media di dalam media elektronik, tetapi pembuatan dalam penyimpanan video yang bermuatan asusila diatur hanya di dalam undang-undang pornografi sedangkan penjelasan mengenai penyebaran video yang bermuatan asusila dalam kitab undang-undang hukum pidana yaitu pasal 282 pasal (1) "barang siapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan terang-terangan diminta atau ditunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 45.00,-. bahwa larangan dalam media elektronik juga diatur didalam kitab undang-undang hukum pidana .

B. Implementasi terhadap penyebaran video yang bermuatan asusila di kota Banjarmasin

Sanksi terhadap pelaku perbuatan asusila secara elektronik mengenai penyebaran dan pembuatan video yang bermuatan asusila bahwa secara sengaja perbuatan itu dilakukan memang sudah jelas perbuatan tersebut melanggar hukum begitupun dengan pembuatan video yang bermuatan asusila, baik secara sengaja dengan maksud untuk diperjual belikan dengan mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri kepada orang lain yang sebagai korban, ataupun untuk menyimpan dengan maksud untuk menakut-nakuti sebagai ancaman yang juga untuk mengambil keuntungan diri sendiri, termasuk dalam kepentingan, tetapi jika maksud untuk koleksi pribadi dalam pembuatan video yang beruatan asusila secara sengaja direkam kemudian video tersebut menjadi tersebar luas dalam media elektronik mestipun tidak ada unsur niatan untuk menyebarkan tapi tanpa di sadari pihak-pihak yang beriatan jahat menyebarkan sehingga tersebar, maka sama halnya melanggar peraturan dan melawan hukum karena dalam undang-undang nomor 44 tahun 2008 pasal 6 menjelaskan bahwa tidak boleh menyimpan produk yang bermuatan asusila. Baik menyimpan dari hasil pengunduhan dalam media internet secara bebas ataupun dalam penyimpanan secara pribadi langsung. kasus penyebaran video yang bermuatan asusila di kota Banjarmasin yang dikaji ini masih dalam tahap proses penyelidikan maka implementasinya dalam aturan hukum belum sepenuhnya diterapkan karena

selain dalam tahap penyelidikan membutuhkan keterangan-keterangan dan barang bukti yang cukup kuat dalam kronologi kejadian tersebut sehingga peraturan yang akan diterapkan sesuai dengan fakta dan barang bukti perkara yang terjadi, yang sudah ditetapkan dalam pelaku kasus Banjarmasin tersebut bahwa penyebaran itu sudah ditetapkan sesuai dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik yakni pasal 45 ayat (1) "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), karena dalam kasus di Banjarmasin ini yang jelas menjadi pelaku pertama yakni penyebaran video tersebut karena kasus terungkap saat adanya laporan dari orang yang merasa dirugikan.

Unsur strafbaar feit menurut D.Simons yakni perbuatan yang dilakukan manusia, diancam dengan pidana (strafbaar gesteld), melawan hukum, dengan dilakukannya kesalahan, dan oleh orang yang bertanggung jawab. Artinya bahwa perbuatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka tetapi adanya niatan untuk membuat rekamam video yang bermuatan asusila merupakan perbuatan manusia dengan perbuatan melawan hukum mestipun tidak ada niatan untuk menyebarkan, tetapi jika sudah tersebar maka perbuatan itu menjadi melawan hukum akibat dari ketidak hati hatian dalam perbuatan yang dilakukan dapat berakibat buruk bagi masyarakat dengan mudah mengakses internet membuka rekaman yang sudah tersebar itu dan juga pihak dari pemeran menjadi tercemar akibat perbuatan tersebut dapat tersebar luas.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini , peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, mengatur tentang tindak pidana asusila secara elektronik dalam penyebaran video yang bermuatan asusila, namun undang-undang ini tidak secara spesifik mengatur mengenai pembuatan video yang bermuatan asusila sebagaimana halnya diatur dalam undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yang secara khusus mengatur.
2. penegakan hukum terhadap tindak pidana asusila secara elektronik di kota Banjarmasin menetapkan bahwa hanya pelaku-pelaku penyebarannya saja yang dikenakan sanksi, tidak menjerat kepada pembuat sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Dengan demikian terhadap kasus ini hanya diberlakukan ketentuan -ketentuan berdasarkan undang-undang

nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

V. SARAN

Berdasarkan pembahasan pembahasan mengenai tindak pidana asusila secara elektronik telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran yakni :

1. Diharapkan dalam peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang Informasi Transaksi Elektronik ini Pemerintah dan Badan Legislatif mengatur juga mengenai pembuatan secara rinci dalam pembuatan asusila yang sengaja dilakukan dalam pembuatan video yang bermuatan asusila meskipun hanya kepentingan pribadi tetapi menjadi tersebar luas di media elektronik. Juga peraturan yang sudah jelas adanya larangan mengenai pembuatan video yang bermuatan asusila dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat, agar memahami jika pembuatan yang dilarang tidak membedakan adanya kepentingan pribadi tetap saja melanggar jika sudah tersebar luas.
2. Diharapkan juga terhadap kasus yang dikaji ini meskipun masih dalam proses penyelidikan. Pembuatan yang sudah dilakukan terhadap pemeran dalam penyebaran video yang bermuatan asusila sudah melanggar hukum, karena pembuatan dalam pembuatan video yang bermuatan asusila secara elektronik ini sudah menjadi pembuatan yang menyimpang meskipun di dalamnya terdapat unsur suka sama suka tetapi video sudah tersebar luas dan perekaman dalam penyimpanan produk pornografi itu dilarang. Kepada penegak hukum yang berwenang jangan hanya menjerat pada penyebarannya saja tetapi pemeran seharusnya mendapati hukuman dengan dijera undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi .
3. Serta diharapkan kepada masyarakat luas untuk berhati-hati dalam penggunaan media elektronik agar tidak seenaknya menggunakan media internet dengan bebas terutama dalam penyalahgunaan media internet secara global.

- [7] <https://regional.kompas.com/read/2019/09/02/09044331/fakta-kasus-video-mesum-banjarmasin-tersebar-di-whatsapp-hingga-pemeran-pria?page=all>
- [8] <https://sunasuahdi.wordpress.com/2013/04/24/teori-tentang-cyber-crime-dan-cyber-law/>

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta
- [2] Agus raharjo, 2002, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- [3] Barda Nawawi arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia)*, Jakarta, Grafindo Persada
- [4] Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung.
- [5] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [6] Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi